

Dialog

Vol. 37, No. 1, Juni 2014

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM

Prof. Dr. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ir. Sunarini, M.Kom.

SEKRETARIS REDAKSI

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

REDAKTUR PELAKSANA

Dr. Muhammad Rais, M.A

SEKRETARIAT REDAKSI

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

DESAIN GRAFIS

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Hubungan antara agama dan negara merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut karena aspek-aspek kehidupan dalam beragama memberikan banyak pengaruh pada kehidupan bernegara. Oleh karena itulah maka tidak mengherankan apabila diskursus tentang agama dan negara merupakan diskursus yang tidak pernah selesai karena adanya dialektika tentang kekuasaan yang dimiliki oleh negara sebagai pengatur kehidupan bernegara dalam suatu masyarakat atau bangsa di satu sisi, dengan wewenang agama dalam mengatur kehidupan masyarakat di sisi lain. Realitas ini menimbulkan persinggungan yang terkadang cukup tajam dalam kehidupan bermasyarakat terutama berkaitan dengan hubungan warga masyarakat yang berbeda agama di suatu negara.

Tulisan-tulisan dalam jurnal kali ini membahas pelbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan dan hubungan antara manusia dan sesamanya yang dalam bahasa agama disebut *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Tulisan-tulisan tersebut membahas tentang peran agama dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Misalnya dalam tulisan pertama ketika Sajari membahas tentang dzikir sebagai makanan spiritual Sang Sufi, sesungguhnya menyampaikan pesan pentingnya hubungan antara hamba dan Tuhan dijaga lewat media dzikir. Kemudian, pembahasan-pembahasan lain tentang hubungan antar umat beragama di Indonesia misalnya yang tertuang dalam tulisan tentang fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI, oleh Rumadi, *Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini*, oleh Fachry Ali, *Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan di Jawa Tengah* oleh Husni Mubarak, *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* oleh Nuruddin, *Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas Islam Tionghoa di*

Yogyakarta oleh Muryanti serta tiga tulisan akhir yaitu tentang *Sanksi atas UUU Perkawinan di Negara-negara Islam* oleh Atho Mudzhar, *Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat* oleh Ali Romdhoni dan *Meninggalkan Jalan Teror* oleh Gazi Saloom, secara keseluruhan membahas hubungan diantara warga masyarakat, baik dalam bingkai agama yang sama maupun agama yang berbeda dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tulisan-tulisan di atas membahas tentang bagaimana agama dipahami oleh para pemeluknya dalam konteks politik, sosial dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Tulisan-tulisan tersebut di atas memberikan gambaran dan analisis terjadinya dialektika yang amat dinamis dalam memahami agama. Dialektika yang amat dinamis ini selanjutnya juga menjadi benturan-benturan yang cukup tajam ketika pemahaman-pemahaman tersebut dituangkan secara hukum dalam suatu aturan. Kata agama dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Oleh karena itulah, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian agama didefinisikan secara sederhana, yaitu dari kata “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Dengan demikian secara ringkas agama berfungsi untuk memberikan ketenangan dalam diri pengikutnya agar tidak kacau, baik dalam hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta, maupun dengan sesamanya dan juga alam sekitarnya.

Maksud yang juga relevan dengan tujuan agama untuk tidak kacau dan memberikan ketenangan juga disebutkan dalam konteks agama Islam yaitu *din*, suatu konsep yang dapat berarti hutang yang mengikat. *Din* dalam pengertian Islam tidak hanya mengikat atau hutang yang harus dipenuhi, namun juga menuntut adanya kewajiban dari para pengikutnya untuk melaksanakan ajaran agama sebagai bentuk pemenuhan hutang yang menjadi kewajiban tersebut. Artinya agama mengikat

hubungan seseorang dengan Tuhan Sang Pencipta. Senada dengan hal ini, kata *religion* yang berarti agama juga memiliki akar kata *religare* yang berarti mengikat. Dalam konteks ini, agama sebagai suatu ikatan antara hamba dan Tuhannya dalam kehidupan diatur dalam ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran agama inilah yang selanjutnya menjadi pedoman manusia dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Islam, pedoman Tuhan diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang dilengkapi dengan hadis sebagai bagian integral yang menjelaskan Al-Qur'an.

Adapun negara merujuk pada suatu wilayah yang memiliki rakyat dan pemerintahan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara hukum untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sehubungan dengan hal inilah, maka masyarakat sebagai anggota suatu negara juga terikat dengan aturan-aturan hukum negara di satu sisi, sementara di sisi lain juga terikat dengan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus kehidupan agama di Indonesia terutama antara Islam dan negara terkadang terjadi benturan yang berakar dari pemahaman mengenai bagaimana seharusnya Islam diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benturan-benturan pemahaman yang terdapat dalam masyarakat Islam sendiri memiliki dampak dalam hubungan sosial dan politik dalam masyarakat karena pemahaman-pemahaman yang beragam tersebut berpengaruh dalam kebijakan politik pemerintah yang dituangkan dalam peraturan hukum.

Berkaitan dengan hukum sebagai bagian penting dari pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, tulisan Atho Mudzhar tentang pentingnya melakukan perbandingan dalam melihat penerapan hukum Islam di negara-negara lain menjadi amat urgen dilakukan. Perbandingan menjadi amat penting untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas serta mendalam mengenai suatu persoalan. Dalam tulisannya tentang sanksi atas

pelanggaran undang-undang perkawinan dalam Islam misalnya, Atho Mudzhar menekankan pentingnya melakukan penelitian perbandingan untuk kepentingan pengembangan dan pembaruan hukum Islam dalam perkawinan.

Tulisan Ali Romdhoni mengulas tentang strategi pesantren dalam menghadapi dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Jika pesantren tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan pesantren akan kehilangan peminatnya.

Tulisan-tulisan dalam edisi jurnal kali ini menjadi amat penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu munculnya radikalisme agama yang menggugat eksistensi negara yang berujung pada tindakan-tindakan yang dianggap teror, ataupun tindakan-tindakan yang belum merupakan teror namun menggugat eksistensi negara, lalu munculnya konflik-konflik keagamaan yang didasarkan pada pemahaman-pemahaman yang dilegitimasi dalam suatu undang-undang atau peraturan.

Selain itu, relasi antarumat beragama yang seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik juga menjadi penting dicermati dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini misalnya fatwa-fatwa dari NU, Muhammadiyah dan MUI tentang isu-isu perkawinan muslim dan non muslim, kewarisan, persaksian, dan tentang mengucapkan selamat natal. Kemudian kajian tentang kelompok agama dan kasus bagaimana konflik tersebut dapat dicegah, seperti tulisan Husni Mubarak tentang kasus konflik di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, serta persoalan pemahaman keagamaan yang tentu saja secara formal bertumpu pada lembaga pendidikan. Dalam hal ini tulisan Nuruddin tentang *Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* menjadi penting dicermati dan dielaborasi lebih lanjut, meskipun dalam tulisannya tidak secara rinci membahas tentang dampak pemahaman keagamaan yang diajarkan namun menjadi penting untuk melihat posisi lembaga pendidikan Islam (madrasah) dalam

persaingan global yang akan memberikan dampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus Indonesia yang amat penting dicatat adalah bahwa hubungan agama dan negara seharusnya dapat terus ditingkatkan lebih harmonis dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat Indonesia memiliki beragam agama, suku bangsa, adat istiadat dan kepercayaan. Oleh karena itulah, persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian untuk kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang lebih baik, toleran dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut, konflik-konflik yang timbul dari pemahaman keagamaan

selayaknya dapat diberi solusi yang tepat dengan mengetahui akar-akar permasalahannya.

Tulisan-tulisan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi pemicu elaborasi pemikiran yang lebih berkembang, jernih dan analitik serta solutif dalam menghadapi problematika yang muncul terkait hubungan antara agama dan negara yang memiliki dimensi luas dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga sejumlah tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca.

Salam hormat
Redaksi

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 37, No. 1, Juni 2014

DIMYATI SAJARI

Dzikir: Makanan Spiritual Sang Sufi: 1-12

RUMADI

Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia: Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim: 13-32

FACHRY ALI

Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama dan Renungan Dewasa Ini: 33-48

HUSNI MUBAROK

Mencegah Eskalasi Konflik Keagamaan: Studi Kasus Konflik Natal Bersama di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah: 49-60

NURUDDIN

Perkembangan Madrasah Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bingkai Penelitian: 61-74

MURYANTI

Nasionalisme dalam Pandangan Etnik Minoritas di Yogyakarta: Studi Kasus Anggota Perhimpunan Indonesia-Tionghoa/INTI Yogyakarta: 75-86

M. ATHO MUDZHAR

Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara: 87-96

ALI ROMDHONI

Strategi Pesantren Menghadapi Perubahan Masyarakat: 97-108

GAZI SALOOM

Meninggalkan Jalan Teror: Antara Deradikalisasi dan *Disengagement*: 109-120

BOOK REVIEW

MUHAMMAD ISNUR

Potret Keberhasilan Pemolisian di Indonesia: 121-126

STRATEGI PESANTREN MENGHADAPI PERUBAHAN MASYARAKAT

ALI ROMDHONI*)

ABSTRAK

Upaya mempertahankan kelangsungan lembaga pendidikan pesantren memerlukan pemikiran dan kerja berat. Di sini, pesantren dihadapkan pada dua persoalan penting. Pesantren dituntut bisa mempertahankan ciri khasnya, sebagai lembaga pendidikan agama dan benteng moral masyarakat. Di lain sisi, pesantren juga diharuskan mengimbangi dinamika kehidupan masyarakat di sekelilingnya dengan merespon perkembangan zaman.

Tulisan ini ingin menawarkan tiga hal yang musti digarap oleh civitas akademika (masyarakat) pondok pesantren, agar lembaga ini tetap *survive*. *Pertama*, pesantren harus konsisten menjadi lembaga pendidikan pengkaderan ulama. *Kedua*, pesantren harus terus mencari format yang terbaik untuk metode pengajarannya. *Ketiga*, dunia pesantren harus mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, yang tidak bergantung dengan pihak mana pun, termasuk pemerintah.

KATA KUNCI:

Pesantren, Pendidikan, Perubahan Masyarakat, Islam

ABSTRACT

The effort to maintain the sustainability of pesantren needs hard-work and thought. Pesantren in Indonesia faces two problems. Pesantren must maintain its unique characteristics as religion education and moral shelter for society in one side. In other side, pesantren must be in line with the dynamic of society life in responding the development of ages.

This article offers three things that must be responded by stakeholders of pesantren in order this institution can survive. Firstly, pesantren must consistently be an institution for cadering ulama. Secondly, pesantren must search the best method for learning and teaching continuously. Thirdly, pesantren can maintain as independent education institution.

KEY WORDS:

Pesantren, Education, Society of Change, Islam

A. PENDAHULUAN

Eksistensi Pesantren yang Terancam

Lahirnya lembaga pendidikan Islam tradisional pondok pesantren di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari sejarah masuknya Islam

ke Indonesia. Adalah pondok pesantren yang menjadi media transformasi penyebaran ajaran, doktrin dan dasar-dasar agama Islam di bumi Nusantara. Sudah sejak berabad-abad yang lalu—setidaknya sejak tahun 1760-an¹—pesantren memainkan peranan penting dalam kerja menyebarkan informasi keislaman.

*) Ali Romdhoni MA (ali_romdhoni@yahoo.com) pendiri lembaga kajian *Literatur Nusantara* di Jakarta, dan dosen di STAI Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah. Tinggal di Desa Prawoto, Sukolilo, Pati.

*) Naskah diterima Maret 2014, direvisi April 2014, disetujui Mei 2014

¹ Di Ponorogo terdapat pondok pesantren Tegalsari. Pada awal abad ke-19 M Tegalsari sangat terkenal dan memiliki santri yang banyak, terutama mereka yang datang dari pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pesantren Tegalsari didirikan oleh

Dengan memberikan pengajaran kepada para santri, pesantren berhasil menjadikan mayoritas masyarakat di Nusantara, khususnya Jawa, memeluk Islam. Padahal, sebelumnya mayoritas penduduk Kerajaan Majapahit ini adalah beragama Hindhu/Budha/Shiwa. Tidak hanya itu, pesantren berhasil menyebarkan ajaran dengan unik, yaitu penyebaran doktrin keagamaan melalui jenjang pendidikan tanpa ada unsur kekerasan.

Hal ini sekaligus menjadi model khas masuknya Islam di Indonesia, dan membedakan dengan proses masuknya Islam di belahan negara lain, di Spanyol, misalnya, yang melalui proses kekerasan (peperangan). Sampai saat ini, kehadiran pondok pesantren menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia.

Menurut Qodri Abdillah Azizy, pesantren merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pecinta ilmu dan peneliti yang berupaya untuk mengurai anatominya dari berbagai dimensi. Dari institusi pesantren, sebagai obyek studi, telah lahir para doktor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain sebagainya.²

Pada awal berdirinya, sistem pembelajaran di pondok pesantren, umumnya, sangat sederhana. Sistem yang lazim digunakan dalam proses pembelajaran adalah *wetonan*, *sorogan* dan *bandongan*.³ Pada mulanya, tujuan utama pondok pesantren adalah menyiapkan santri untuk mendalami ilmu pengetahuan agama (*tafaqquh fid din*). Akan tetapi, sejak 1970-an bersamaan dengan program modernisasi pondok pesantren mulai membuka diri untuk mempelajari mata pelajaran umum.

Hal ini bisa dimaknai, bahwa pesantren dengan dinamika dan perubahannya ingin

seorang kyai terkenal, Kyai Agung Muhammad Besari (1742-1773) di Ponorogo pada pertengahan abad ke-18 M. Pesantren ini mencapai kejayaannya di masa kepemimpinan Kyai Kasan Besari (1800-1862). Baca Hanun Asroah. *Pelebagaan Pesantren. Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*. (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002). hal. 269.

² Baca Qodri Abdillah Azizy. "Memberdayakan Masyarakat Pesantren dan Madrasah". Pengantar dalam Ismail SM. *Signifikansi Pesantren dalam Mengembangkan Masyarakat Madani*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). hal. 173.

³ Lihat Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. (Jakarta: INIS, 1994). hal. 21.

eksistensi (keberadaan)-nya diakui masyarakat. Persoalan eksistensi pesantren selalu menjadi pembicaraan menarik dalam diskusi-diskusi seputar kepesantrenan dan atau pendidikan. Improvisasi ataupun inovasi yang dilakukan pesantren untuk mempertahankan eksistensinya dimulai dengan membuka diri menerima system pendidikan klasikal dan kurikulum pemerintah, baik di bawah naungan Kementerian Agama RI maupun Kementerian Pendidikan Nasional.

Bisa dikatakan, upaya mempertahankan kelangsungan lembaga pendidikan pesantren bukan perkara mudah. Ia memerlukan pemikiran dan perjuangan yang berat. Di sini, pesantren dihadapkan pada dua persoalan penting. Di satu sisi, pesantren dituntut bisa mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan agama dan benteng moral yang mencetak generasi muslim ideal. Sementara di lain sisi, pesantren juga diharuskan mampu mengimbangi dinamika kehidupan masyarakat di sekelilingnya dengan merespon perkembangan zaman.

Terbukti, di tengah perubahan gaya berfikir masyarakat (*user*)-nya, pesantren tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif. Pesantren mampu mendesain orientasi belajar siswa yang lain dari lembaga pendidikan kebanyakan, yaitu belajar yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan (baca: kesuksesan) dunia-akhirat (*sa'adatud darain*). Kebahagiaan dunia akhirat tidak lain adalah idam-idaman setiap muslim.

Dengan orientasi *sa'adatud darain*, pesantren kemudian merancang kurikulum pendidikan yang mengantarkan anak didiknya mencapai target yang ditentukan. Tidak ada jalan lain, pesantren memilih untuk mengkombinasikan antara pendidikan kitab-kitab salaf sebagai kurikulum inti dan mengajarkan pula mata pelajaran umum untuk mengimbangi perkembangan dunia ilmu pengetahuan modern. Namun demikian, titik tekan pendidikan pesantren tetap konsisten, yaitu penguasaan ilmu agama dan akhlak.⁴

Tipologi Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keislaman di Indonesia yang khas. Pada awalnya, konon lembaga ini merupakan rintisan

⁴ Tim Depag RI. *Pola Pembelajaran Pesantren*. (Jakarta: Departemen Agama, 2003). hal. 3.

Walisongo⁵ yang berjasa dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa. Dengan mengusung berbagai materi yang bersentuhan langsung dengan materi keagamaan, pesantren menampilkan diri sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas pendidikan Islam bagi masyarakat.

Warisan Walisongo dalam *sosio-religius* agaknya semakin menguat pada abad berikutnya. Kemasyhuran Walisongo sebagai pemimpin agama berkesinambungan dalam bentuk menguatnya status ulama di mata kaum santri Jawa. Ini terlihat sejak Islam meluas menjadi agama Jawa, para ulama (kiai Jawa) telah menikmati status *sosio-religius* yang sangat istimewa.⁶ Bahkan tidak hanya di Jawa, pada seluruh Nusantara kiai merupakan sentral di tengah-tengah masyarakat. Posisi ulama atau kiai yang demikian inilah yang membuat pesantren— lembaga yang dipimpin kiai dan mencetak kader kiai— tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang kuat.

Hingga saat ini jumlah pesantren di Nusantara mencapai puluhan ribu, dengan corak dan modelnya yang beragam. Masing-masing pesantren mempunyai ciri khas, metode, kurikulum dan tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, antara satu pesantren dengan pesantren lainnya terdapat tipe-tipe yang dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang umum dimiliki oleh masing-masing pesantren.

Dalam hal ini, Zamachsyari Dhofier secara garis besar membagi pesantren menjadi dua kelompok besar, yakni: *Pertama*, Pesantren Salafi. Pesantren jenis ini tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Sedangkan system madrasah diterapkan untuk memudahkan system *sorogan* yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.

Kedua, Pesantren Modern. Yakni pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren.

Pondok pesantren Gontor tidak mengajarkan lagi kitab-kitab Islam klasik. Pesantren-pesantren besar, seperti Tebuireng dan Rejoso di Jombang, telah membuka SMP dan SMA serta universitas. Sementara di lain pihak tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.⁷

Fenomena mutakhir, dalam pengamatan penulis, adalah langkah yang diambil pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda di Kajen, Kiai Sahal Mahfudh dan pengasuh pondok pesantren Al-Anwar di Sarang, Kiai Maimun Zubair. Kedua pimpinan pesantren terkemuka di Jawa tengah ini, pada lima tahun terakhir, resmi mendirikan sekolah tinggi agama Islam.⁸

Sekarang ini, tipe pesantren sudah semakin beragam dan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Karena itu, pengelompokan yang dilakukan oleh Zamachsyari Dhofier di atas, nampaknya perlu diurai lagi.

Dalam hal ini, Ridwan Nasir mengelompokkan pesantren menjadi lima, yaitu: *Pertama*, Pesantren Salaf, yaitu pesantren yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan *salaf*, (*weton* dan *sorogan*) dan sistem klasikal.

Kedua, Pesantren semi berkembang, yaitu pesantren yang di dalamnya terdapat system pendidikan salaf (*weton dan sorogan*) dan system madrasah swasta dengan kurikulum 90 persen agama dan 10 persen pendidikan umum.

Ketiga, Pesantren berkembang, yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja lebih variatif, yakni 70 persen agama dan 30 persen pendidikan umum.

Keempat, Pesantren modern, yaitu seperti pesantren berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap dengan lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, sampai perguruan tinggi dan dilengkapi dengan *takhasus* (pendidikan khusus) bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Kelima, Pesantren ideal, yaitu seperti pesantren modern, tetapi lembaga pendidikannya lebih lengkap terutama dalam bidang keterampilan, yang meliputi tehnik, perikanan, pertanian, perbankan, dan lainnya

⁵ Walisongo adalah sebutan untuk para wali (kekasih Allah) yang termasyhur di Pulau Jawa, yang berjumlah sembilan orang.

⁶ Baca Abdurrahman Mas'ud. "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam Nurul Huda dkk. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002. hal. 14.

⁷ Lihat Zamachsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES. 1982. hal. 41-42.

⁸ Pesantren Al-Anwar membidani kelahiran STAI Al-Anwar di Rembang, sementara Madrasah Mathali'ul Falah memelopori berdirinya STAI Mathali'ul Falah di Pati.

yang benar-benar memperhatikan kualitas dengan tidak menggeser ciri khas pesantren.⁹

Pembagian model pondok pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan Nasir di atas, menurut penulis, cukup mewakili corak dan ragam pesantren yang semakin berkembang. Meskipun, tidak menutup kemungkinan, tipologi pesantren akan bertambah lagi sesuai dengan modifikasi dan inovasi yang dilakukan oleh para pengasuh pesantren, dan juga seiring dengan laju pesatnya perkembangan cara berfikir masyarakat Indonesia. Intinya, sangat mungkin pesantren mempunyai beberapa tipe lagi yang semakin menunjukkan dinamisasi pendidikan pesantren di Tanah Air.

Husni Rahim juga membagi tipologi pesantren menjadi enam, yaitu: *Pertama*, Pesantren Salaf dan pesantren Khalaf. Disebut pesantren salaf karena sistem pembelajarannya masih menggunakan sistem *sorogan*, *bandongan* dan *wetonan*, tanpa kelas dan batas umur. Sedangkan disebut pesantren khalaf karena sistem pengajarannya sudah menggunakan sistem kelas, kurikulum dan batas umur. Perbedaan ini tidak bisa *rigid* (kaku), karena dalam perkembangannya banyak pesantren yang disebut salaf/ tradisional sudah menerapkan sistem pembelajaran kelas, meskipun terbatas pada madrasah atau sekolah yang dibangun di lingkungan pesantren.

Kedua, pesantren dengan tipe pendidikan formal, yaitu jalur sekolah, jalur luar sekolah dan jalur pra sekolah. Jalur sekolah yaitu yang menggunakan kurikulum dari Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional.

Ketiga, pondok pesantren yang dibedakan berdasarkan jumlah santrinya. Disebut pesantren besar kalau jumlah santrinya di atas 5.000 santri. Jika jumlah santri antara 3.000 sampai 5.000 santri, disebut pesantren menengah. Dan jika santrinya kurang dari 1.000, biasanya disebut pesantren kecil.

Keempat, pondok pesantren yang berafiliasi dengan organisasi massa Islam tertentu, seperti RMI, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, Al Wasliyah dan lain sebagainya.

Kelima, pondok pesantren yang menampung santri *mukim* dan santri *kalong*. Santri *mukim* yaitu santri yang tinggal di asrama dalam lingkungan pondok pesantren. Sedangkan santri *kalong* adalah santri yang bertempat tinggal di luar asrama pesantren, tapi belajar di madrasah atau di pesantren.

Keenam, pondok pesantren pedesaan dan perkotaan. Hal ini didasarkan pada letak sebuah pesantren dan asal santri. Pesantren pedesaan kebanyakan berada di desa, bahkan jauh dari pusat keramaian dan para santri umumnya berasal dari desa. Sedangkan pesantren perkotaan, biasanya terletak di pinggiran kota atau pusat kota, dan kebanyakan santrinya berasal dari kota.¹⁰

Pesantren dan Advokasi Masyarakat Bawah

Bila kita mengamati kondisi di Indonesia, sejak awal pertumbuhan dan penyebaran pesantren yang penyuguhkan spesialisasi kajian—baik tradisional ataupun modern—telah membawa dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Kehadiran pondok pesantren telah nyata membantu masyarakat dan/ atau pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, pesantren telah menawarkan jenis pendidikan alternatif bagi pengembangan pendidikan nasional.

Kini di abad ke-21, peran pondok pesantren bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Peran pesantren pun melebar menjadi agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran bila sekarang, pemerintah atau lembaga sosial kemasyarakatan menginginkan pondok pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang sangat menunjang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang tinggi.

Pesantren sebagai lembaga sosial mulai berkembang sejak awal tahun 1970-an. Di sini, fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga agama, melainkan juga menanggapi soal-soal kemasyarakatan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pekerjaan sosial ini semula mungkin

⁹ Ridwan Nasir. *Mencari Format Tipologi Pendidikan Ideal. Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hal. 87-88

¹⁰ Baca Husni Rahim. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). hal. 159-160.

merupakan pekerjaan sampingan atau 'titipan' dari pihak luar pesantren. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pekerjaan sosial ini justru memperluas gerak pesantren dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap sejumlah pesantren di Jawa Barat pada pertengahan tahun 1970-an menunjukkan, bahwa pesantren telah lama menjalankan peran sosial yang berpengaruh luas. Tugas kemasyarakatan pesantren tidaklah mengurangi arti tugas keagamaannya, karena peran tersebut merupakan penjabaran nilai-nilai hidup keagamaan bagi kemaslahatan masyarakat. Dengan tugas seperti ini pesantren akan menjadi milik bersama, didukung dan dipelihara oleh kalangan yang lebih luas serta akan berkesempatan melihat pelaksanaan nilai hidup keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan fungsi sosial ini, pesantren berhasil merespons persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat, dan sebagainya. Menghilangkan kemiskinan bukan saja dengan menggembirakan si miskin pada hari raya, atau memberikan uluran tangan saat mereka meminta, atau mengasuhnya di panti asuhan, melainkan membawa mereka pada kehidupan yang layak, memperpendek jurang pembatas si kaya dan si miskin, atau tindakan lainnya.¹¹

Banyak juga pesantren yang mengambil peran pendampingan terhadap kelompok masyarakat bawah, dengan membekali mereka keterampilan dan wawasan seputar profesinya, seperti wawasan pertanian, perikanan, kelautan, dan perkebunan.

Sebagai contoh, di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terdapat pondok pesantren Maslakul Huda yang memiliki lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat—Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM). Lembaga ini pada era 80-an hingga awal abad ke-20 pernah sukses

utamanya bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.¹²

Program yang dijalankan BPPM Pesantren Maslakul Huda adalah pembentukan dan fungsionalisasi kelompok, konsultasi usaha, pengembangan modal dan kegiatan produktif, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan kesatuan sistem yang terintegrasi. Pembentukan kelompok dilakukan oleh motivator dengan cara mendatangi rumah ke rumah (*in house consulting*) untuk menginventarisir permasalahan yang ada.¹³

Gagasan brilian orang-orang pesantren ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan keberpihakan pengasuh pesantren Maslakul Huda sendiri, almarhum Kiai Haji Sahal Mahfudh. Tokoh ini dikenal masyarakat luas memiliki perhatian serius dalam bidang pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan. Dengan menggunakan argument di dalam literatur lama (kitab kuning), kiai ini bersuara lantang, umat Islam harus menampilkan diri sebagai sekelompok orang yang mandiri, berpendidikan, dan menebar kebaikan bagi orang lain.

Dalam pengamatan penulis, meski Maslakul Huda sudah ditinggal pendirinya, namun di Desa Kajen, di dekat pesantren Maslakul Huda terdapat beberapa sarana pengembangan masyarakat yang diidentikan dengan pesantren ini: Rumah Sakit Islam Pati di Kajen, BPR Artha Huda Abadi dan kampus Islam berbasis nilai-nilai Pesantren.

Tiga hal ini tentu menarik didiskusikan, pesantren membidani kelahiran bank, rumah sakit dan kampus. Kalau kampus mungkin bisa mengerti, tetapi bank dan rumah sakit masih menjadi hal yang mengganjal, terutama bank. Tetapi ini menjadi bukti, dari pesantren sejatinya memungkinkan bagi lahirnya model yang beda bagi pemberdayaan masyarakat. Karena itu, masyarakat pesantren harus tetap teguh

¹¹ Lihat Amin Haedari, "Perluasan Peran Pesantren", Dalam <http://www.republika.co.id>.

¹² Hasil rumusan para peserta diskusi tentang *Entrepreneurship* oleh P3M di Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati, 13 Maret 2014.

¹³ Baca Zubaedi. "Memotret Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajen dalam Aksi Pengembangan Masyarakat" dalam *Jurnal Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. V, No. Uuni 2004:17-33.

mempertahankan dirinya, karena ia bagian penting dari aset berharga bangsa ini.

Tantangan Pesantren di Era Modern: Beberapa Asumsi Ketahanan Pesantren

Dalam kehidupan sosial keagamaan, pesantren menjadi pusat tumpuan masyarakat dalam mendidik anak-anak mereka. Umat (Islam) menginginkan anaknya menjadi seorang yang berilmu sekaligus mempunyai kepribadian yang saleh. Namun, kondisi ini mengalami pergeseran seiring dengan merebaknya modernisasi.

Pertanyaannya, masihkah pesantren memegang posisi strategis sebagai lembaga pendidikan yang menjadi harapan masyarakat?

Memang, bila kita melihat sejarah ke belakang, di tengah arus modernitas pesantren tetap bertahan dengan ciri khasnya, dengan menyajikan muatan kurikulum yang bersumber dari kitab-kitab kuning. Di antara kitab-kitab tersebut adalah: untuk tingkat dasar diajarkan kitab *Washaya*, *Safinah al Shalah*, *Tarjamah Nahwu Sharf* dan *Juz 'Ammah*. Untuk tingkat menengah diajarkan kitab *fathul Qarib*, *Qawa'id al Lughah*, *Bulugh al Maram*, *al Minah al Tsaniyyah*, *Irsyad al Ibad* dan *al Qur'an bin Nadlar*. Sedangkan untuk santri kelas diajarkan kitab *tafsir al Jalalain*, *tafsir Marah Labid*, *Bidayah al Mujtahid*, *Shahih Bukhari*, *Syarah al Fiyah Ibnu 'Aqil*, dan *Ihya' Ulumuddin*, *al Qur'an bil Ghaib* dan lain sebagainya.

Mengapa dalam sejarahnya pesantren masih tetap *survive*—setidaknya hingga hari ini. Beberapa sejarawan dan intelektual muslim memberikan penjelasan mengenai hal ini. Azyumardi Azra, misalnya, menjelaskan, karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kelebihan dan keunikan. Kebanyakan lembaga pendidikan lain lenyap tergusur oleh ekspansi pendidikan umum, atau mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum, atau setidaknya menyesuaikan diri dan sedikit banyak mengadopsi isi dan metodologi pendidikan umum.¹⁴

Bila kita melihat sejarah pendidikan tradisional-keagamaan di dunia, di sana kita akan menemukan bahwa akibat tekanan modernitas

banyak lembaga pendidikan yang tergusur. Kasus di Timur Tengah, misalnya, lembaga pendidikan tradisional-keagamaan yang berupa *Kuttab*, masjid dan madrasah pernah punah. Menurut Azra, sampai paruh abad ke-19, ketiga lembaga pendidikan tradisional-keagamaan ini relatif mampu bertahan. Tetapi sejak perempatan terakhir abad ke-19, gelombang pembaruan dan modernisasi yang semakin kencang telah menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak mungkin lagi dikembalikan seperti pada eksistensi semula, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional.¹⁵

Nasib lembaga pendidikan tradisional-keagamaan di Timur Tengah berbeda dengan nasib pesantren di Indonesia. Setidaknya hingga saat ini, pesantren tetap merupakan sistem pendidikan klasik dan mungkin paling tradisional di negara ini yang masih bertahan. Basis kekuatan eksistensial pesantren terletak pada corak dan paham keislaman masyarakat itu sendiri. Di pihak lain, basis eksistensial pesantren terletak pula pada integrasi lembaga ini ke dalam struktur-struktur lembaga yang ada. Bahkan menurut Ismail SM, pesantren sampai saat ini tetap menjadi sebuah wacana yang selalu hidup dan dinamis, segar dan aktual.¹⁶

Di samping itu, pesantren juga mempunyai karakter tertentu yang selalu dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Pesantren selalu mampu mengadopsi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keadaan ini oleh Abdurrahman Wahid disebut dengan istilah sub-kultur.

Ada tiga elemen yang mampu membentuk pesantren sebagai sub-kultur. *Pertama*, pola kepemimpinan pesantren yang mandiri, tidak terkooptasi oleh negara. *Kedua*, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad. *Ketiga*, sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.¹⁷

Secara fungsional-institusional, pesantren sebagai sistem, seperti disinggung di atas, memiliki wajah multi dimensi. Ia memiliki fungsi

¹⁵ Ibid., hal. 6.

¹⁶ Lihat Ismail SM. "Signifikansi Pesantren dalam pengembangan Masyarakat Madani". Dalam *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). hal. 170-171.

¹⁷ Baca Mujamil Qomar, *Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005). hal. 62.

¹⁴ Cermati Azyumardi Azra. "Pengantar" dalam buku Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 2000). hal. ix.

dan peran variatif yang meliputi: fungsi pendidikan, dakwah, sosial-masyarakat, budaya dan sebagainya, bahkan fungsi perjuangan (zaman kolonial). Selama masa kolonial, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat. Tidak berlebihan kalau kemudian pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan *grass root people* yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Selama zaman kolonial pula, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan Belanda. Pemerintah Belanda berpendapat, bahwa pendidikan Islam sangat jelek, baik ditinjau dari segi tujuan, maupun metode dari bahasa Arab yang digunakan untuk mengajar, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum pemerintah kolonial Belanda. Tujuan pendidikan pesantren dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi.

Namun, berkenaan dengan proses modernisasi, pesantren mulai membuka diri dengan model pendidikan modern. Munculnya pesantren modern mengindikasikan bahwa pesantren selalu terbuka dengan pendidikan di luar dirinya. Memang hal ini tergantung dari para kiainya, namun saat ini sudah banyak pesantren yang terbuka. Pesantren mulai menyadari pentingnya melihat kenyataan dan perkembangan pendidikan yang ada. Karena itu, perubahan dan pembaruan di pesantren adalah sebuah keniscayaan.

Itulah pemikiran beberapa pesantren ketika bersentuhan dengan modernitas. Pesantren mempunyai kaidah yang sangat terkenal yang dijadikan landasan dalam melakukan pembenahan dan pembaruan. Kaidah tersebut berupa kaidah *fiqhiyyah*, yakni *al mukhfadhah alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah*. Kaidah ini menjadi sebuah pijakan dalam merumuskan pembaruan pendidikan pesantren.

Pesantren juga menempuh langkah strategis, yakni dengan memantapkan kehadirannya sebagai subsistem pendidikan nasional, sehingga pesantren mampu mengembangkan identitasnya dengan mantap. Identitas pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional akan mantap jika pesantren mampu mengembangkan corak pemikiran rasional dengan memandang ilmu pengetahuan dan sains sebagai bagian dari *sunnatullah*, dan bukan

sebagai bagian dari hukum alam yang terlepas kaitannya dengan hukum Tuhan.¹⁸

Sebenarnya, ketika berbicara pesantren dalam konteks modernitas, apabila dirunut akar sejarahnya bermula dari pengenalan pendidikan modern yang dibawa penjajah Belanda. Berhadapan dengan sistem pendidikan Belanda ini pesantren masih bisa bertahan. Namun ketika berhadapan dengan sistem pendidikan kaum reformis-modernis, pesantren mendapat tantangan yang sangat kuat. Persaingan ini mau tidak mau membuat pesantren harus berubah dan meresponnya.

Namun, perubahan dan respon pesantren sangat unik. Komunitas pesantren menolak paham dan asumsi-asumsi keagamaan kaum reformis, tetapi pada saat yang sama mereka—dalam batas tertentu—juga mengikuti langkah kaum reformis untuk bertahan. Karena itulah, pesantren melakukan sejumlah akomodasi dan penyesuaian yang mereka anggap tidak hanya mendukung kontinuitas pesantren itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi para santri, seperti sistem perjenjangan, kurikulum yang lebih jelas dan sistem klasikal.¹⁹

Seiring dengan gerak laju modernitas, pesantren dituntut menjadi lembaga pendidikan yang dapat menyesuaikan diri, tidak stagnan dengan kurikulum kitab kuningnya, tanpa perkembangan yang berarti. Pesantren menerapkan berbagai upaya pembenahan kurikulum dan proses pengajarannya, sehingga dapat tetap eksis sebagai benteng pertahanan pengkajian ilmu-ilmu keislaman.

Dampak modernisme ini, di antaranya tercermin dari adanya pembacaan yang lebih kritis dan serius terhadap kitab tafsir ulama salaf. Bahkan beberapa pesantren di Jawa Barat lebih maju lagi dengan memasukkan kitab tafsir lainnya, seperti tafsir *al Manar* dan tafsir *al Maraghi*. Namun, langkah ini belum diterima oleh kalangan pesantren pada umumnya.²⁰

Dengan demikian, pesantren tidak hanya mampu bertahan. Tetapi lebih dari itu, dengan

¹⁸ Baca Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. (Jakarta: INIS, 1994). hal. 21.

¹⁹ Cermati juga Azyumardi Azra, "Pengantar" dalam buku Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta: Paramadina, 2000). hal. Xv.

²⁰ Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan), hal. 159.

penyesuaian, akomodasi dan konsesi yang diberikannya, pesantren pada gilirannya juga mampu mengembangkan diri dan bahkan kembali menempatkan diri pada posisi yang penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan.²¹

Secara fisik, pesantren mengalami kemajuan yang cukup fenomenal. Berkat ekonomi umat Islam, sekarang ini tidak sulit mencari pesantren dengan gedung dan fasilitas megah. Pesantren dengan demikian tidak sepenuhnya diasosiasikan dengan kondisi fisik seadanya.

Ekspansi pesantren juga terlihat dari pertumbuhan pesantren yang semula *rural based institutions* kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan urban. Lihatlah, kemunculan sejumlah pesantren di kota, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta dan Banjarmasin.²²

Kondisi ini menunjukkan, bahwa di tengah percaturan pendidikan global, pesantren mampu bertahan dan bahkan memantapkan posisinya. Pesantren tidak tenggelam atau hanyut dalam modernitas. Pesantren mampu melakukan improvisasi dan inovasi yang membuatnya tetap menjadi kebutuhan masyarakat. Terbukti, sampai saat ini pesantren-pesantren tetap dipenuhi banyak santri.

Pesantren bahkan dijadikan pendidikan alternatif di tengah merebaknya kenakalan remaja, kemerosotan moral dan kekhawatiran orang tua terhadap maraknya budaya amoral, narkoba dan kenakalan remaja. Pesantren masih dipercaya sebagai lembaga yang mampu membentuk akhlak anak didik, sekaligus memperdalam ilmu agama. Pendek kata, posisi pesantren tetap strategis dan mantap di tengah persaingan ketat lembaga pendidikan modern, yang satu sisi dibutuhkan masyarakat, sementara di sisi lain kurang menekankan *tafaqquh fiddin*, moralitas dan pengalaman ajaran agama.

Husni Rahim menegaskan,²³ bahwa tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. Karena itu, agar posisi pesantren tetap strategis dan berfungsi sebagaimana mestinya, maka

²¹ Baca Azyumardi Azra, "Pengantar" dalam buku Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*. (Jakarta: Paramadina, 2000). hal. Xxi.

²² Ibid., hal. Xxiii.

²³ Baca Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), hal. 160-161.

pesantren harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

Pertama, pesantren harus tetap berperan sebagai lembaga pengkaderan ulama. Fungsi pesantren sebagai tempat pengkaderan ulama harus tetap dipertahankan, karena pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang siap mendidik dan menyediakan calon ulama untuk masa depan. Perlu dicatat, pesantren belum bisa mencetak kader-kader ulama, misalnya madrasah atau perguruan tinggi Islam.

Namun demikian, ulama yang dilahirkan pesantren seharusnya tidak hanya pandai ilmu agama. Tuntutan modernisasi dan globalisasi mengharuskan ulama memiliki kemampuan lebih, kapasitas intelektual yang memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi yang cukup serta responsif terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi.

Kedua, pesantren harus tetap berfungsi sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya agama Islam. Pada tataran ini pengembangan ilmu dan metodologi pesantren masih lemah. Kebanyakan pesantren hanya mengajarkan ilmu agama dalam arti *transfer of knowledge* tanpa upaya lebih lanjut ke arah pengembangan ilmu. Hal ini bisa disadari karena sistem pembelajaran pesantren masih berkuat pada hafalan dan kecenderungan pengayaan ilmu-ilmu agama *an sich*.

Ketiga, pesantren harus mampu menempatkan dirinya sebagai transformator, motivator dan inovator. Kehadiran pesantren dewasa ini telah memerankan fungsi-fungsi itu, meskipun dalam taraf yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sebagai salah satu komponen masyarakat, pesantren memiliki kekuatan dan daya tawar untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti.

Pesantren Menghadapi Modernisme Pendidikan

Untuk menumbuhkan tradisi intelektual dan rasionalitas, sejak awal abad ke-20 telah disadari perlunya pelajaran umum diberikan di pesantren. Kemudian sejak tahun 1970-an di lingkungan pesantren telah dikenalkan berbagai kursus keterampilan ke dalam pesantren.

Sebagai pendidikan non formal, pesantren sebenarnya sangat perlu mengajarkan ketrampilan-ketrampilan, seperti bertani,

berternak dan pekerjaan-pekerjaan tangan lainnya. Keterampilan ini akan bermanfaat dalam kehidupan para santri kelak. Di sini bisa dipahami, bahwa digalakkannya kursus keterampilan sejak tahun 1970-an dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan atau orientasi santri, dari pandangan hidup yang terlalu condong pada materi pesantren, menjadi seimbang dengan orientasi materi pendidikan formal.

Seiring dengan ini, sejak dua dasawarsa terakhir telah banyak buku-buku agama Islam berbahasa Indonesia yang berisi pembaruan pemikiran Islam masuk ke pesantren. Buku-buku ini dipelajari para santri dan kiai-kiai muda dalam bentuk diskusi dan kegiatan belajar kelompok. Hal ini membawa dampak luas yang menggetarkan seluruh jaringan pesantren, sehingga lebih terbuka dengan sistem lain di luar dirinya.²⁴

Perlu juga dicatat, tantangan yang dihadapi dunia pesantren semakin hari semakin besar, kompleks dan mendesak. Kondisi ini merupakan akibat semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan ini menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai di pesantren, baik nilai yang menyangkut sumber belajar, maupun nilai yang menyangkut pengelolaan pendidikan.

Pesantren juga memasuki budaya masyarakat industri. Sifat-sifat dari masyarakat industri, antara lain adalah tata hubungan semakin rasional, dinamis dan kompetitif. Produk barang-barang yang dihasilkan bersifat *massif* dan *standar*, tetapi juga terspesialisasi. Di bidang pendidikan, kerja kependidikan akan semakin didominasi oleh kegiatan pengembangan sains dan teknologi.

Kondisi tersebut memaksa pesantren untuk mencari bentuk baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemajuan ilmu – teknologi. Tetapi tetap dalam kandungan iman dan takwa. Walaupun pada awalnya pesantren menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan di luar disiplinnya, namun lama kelamaan pesantren harus menyesuaikan. Adanya keengganan dunia pesantren untuk mengadopsi

sistem pendidikan modern, menurut Abdurrahman Wahid, karena ada ketakutan semakin hilangnya fungsi pengembangan ilmu agama.²⁵

Langkah-langkah Pesantren: Sebuah Tawaran

Di tengah hempasan berbagai persoalan yang dialami bangsa Indonesia (korupsi, kemiskinan, ketidakpastian hukum, kriminalitas, konflik daerah, arogansi massa dan ancaman disintegrasi) para pakar, intelektual dan kaum cerdik-pandai ramai-ramai mengemukakan pendapat, bahwa permasalahan dunia akan semakin kompleks, dan antara satu pihak dengan lainnya saling ketergantungan. Hari ini saja, perubahan yang terjadi sering dalam bentuk non-linear, tidak bersambung, dan tidak bisa ditebak.

'Ala kulli hal, masa depan memang merupakan pertanyaan. Tidak ada yang tahu dengan pasti mengenai masa depan. Tidak ada orang yang bisa secara pasti meramalkan. Kita memerlukan pemikiran mendalam dan kesiapan untuk menatap masa depan. Kita harus berani tampil dengan pemikiran yang terbuka dan meninggalkan cara-cara lama yang tidak produktif dan tidak sportif. Apabila kita tidak siap bersikap terbuka dan kompetitif, maka kita akan tersisih dan jadi penonton di era persaingan bebas. Inilah era globalisasi, era pasar bebas, era persaingan bebas di segala bidang.

Fenomena globalisasi banyak melahirkan sifat individualisme dan pola hidup materialistik. Saat ini saja, orang-orang mulai mencari-cari apa yang sebenarnya hilang dari dirinya. Banyak manusia yang secara materi telah tercukupi namun gelisah, seakan ada yang kurang. Orang-orang ini kemudian menemukan jawabnya pada spiritualitas. Banyak kita jumpai di kota-kota besar, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat pergulatan spiritual – *neo sufism*; perkumpulan para sufi di kota.

Di sinilah peran pondok pesantren tertantang. Mampukah pesantren yang sudah ratusan tahun *survive* menghadapi berbagai tantangan musim pancaroba: politik, agama, sosial kemasyarakatan, bertahan dan dinamis menghadapi era global ini.

²⁴ Zamachsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982).

²⁵ Lihat Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1999). hal. 148.

Beberapa bulan yang lalu penulis mengunjungi pesantren yang berada di dekat daerah Pare, Kediri, Jawa Timur. Penulis sengaja berdiam di sana untuk beberapa lama. Tujuan penulis tidak lain untuk mengetahui lebih dalam kondisi pesantren ini. Lembaga pendidikan tradisional yang berlokasi di dekat kawasan pusat kursus bahasa Inggris ini memiliki lahan yang sangat luas.

Uniknya, kompleks bangunan pemondokan santri berjarak-jarak antara satu bangunan dengan lainnya sesuai dengan alamat asal para santri. Misalnya kompleks santri yang berasal dari Pati, Kudus, Semarang, Magelang, Cilacap dan daerah lainnya. Demikian juga kompleks para santri dari Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Madura, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut penuturan pengasuh dan beberapa pengajar, dulunya setiap kamar yang berukuran sekitar 3x3 meter persegi itu dihuni kisaran antara 25 sampai 40 santri. Setiap kompleks biasanya terdiri dari 5 sampai 10 kamar. Tinggal mengalikan. Karena itu, pesantren ini pernah menampung tujuh ribu santri.

Namun ketika penulis berkunjung ke sana beberapa bulan yang lalu, setiap kompleks hanya dihuni 5 sampai 10 santri. Anda bisa menyimpulkan sendiri. Pondok pesantren yang demikian luas ini terasa sepi, bagai tanpa penghuni. Kesepian pesantren ini semakin kentara ketika melihat area pemandian yang juga luas, lokasi mengambil air wudhu serta bangunan masjid. Minimnya jumlah jamaah tidak sebanding dengan ukuran luas masjid.

Fenomena seperti yang penulis tuturkan di beberapa paragraf di atas ternyata juga terjadi pada beberapa pondok pesantren, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Dalam pikiran penulis, apakah pesantren memang mulai ditinggalkan masyarakatnya.

Apabila melihat orientasi awal berdirinya, memang pesantren bertujuan menyuguhkan suatu sistem pendidikan yang mampu menjembatani kebutuhan fisik (jasmani) dan kebutuhan mental spiritual (rohani) manusia. Bukankah ini yang dicari manusia modern? Menurut hemat penulis, masyarakat komunitas pesantren jangan sampai berhenti untuk melakukan pembacaan terhadap pengguna (*user*). Pasalnya, eksistensi pondok pesantren dalam menyikapi perkembangan zaman harus dibarengi

dengan komitmen untuk tetap menyuguhkan pola pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Kekuatan otak (berpikir), hati (keimanan) dan tangan (keterampilan), merupakan modal utama untuk membentuk pribadi santri yang mampu menyeimbangi perkembangan zaman. Berbagai kegiatan keterampilan dalam bentuk pelatihan/*workshop* (*daurah*) yang lebih memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja untuk menambah wawasan santri di bidang ilmu sosial, budaya dan ilmu praktis, merupakan salah satu terobosan konkret untuk mempersiapkan individu santri di era global seperti sekarang ini.

Selain itu, pondok pesantren juga harus berani tampil dan mengembangkan dirinya sebagai pusat keunggulan. Pondok pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa (*taqwimun nufus*), jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga santri yang dibekali dengan berbagai disiplin ilmu keterampilan lainnya, guna dapat diwujudkan dan mengembangkan segenap kualitas yang dimilikinya.

Untuk mencapai tujuan di atas, para santri harus dibekali nilai-nilai keislaman yang dipadukan dengan keterampilan. Pembekalan ilmu dan keterampilan dapat ditempuh dengan mempelajari tradisi ilmu pengetahuan agama dan penggalan dari teknologi keterampilan umum. Menurut penulis, pondok pesantren sangat berpotensi melahirkan anak didik yang mandiri, yang tidak tergantung dengan iklim politik suatu negara tertentu.

Maksudnya, pesantren bisa menjadi contoh lembaga pendidikan yang mampu melahirkan lulusan yang tidak kenal nganggur. Faktanya, masalah terbesar yang dihadapi perguruan tinggi kita adalah hanya meluluskan calon pengangguran terdidik. Pesantren sudah seharusnya tidak mengulangi nasib ini. Ini bisa terwujud apabila pesantren betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik.

Di sinilah peran pesantren perlu ditingkatkan. Tuntutan globalisasi tidak mungkin dihindari. Salah satu langkah yang bijak adalah mempersiapkan pesantren agar siap dalam persaingan. Pada tataran ini masih banyak pembenahan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh pondok pesantren. Paling tidak

tiga hal yang mesti digarap oleh pondok pesantren yang sesuai dengan jati dirinya.

Pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama. Arti ulama di sini harus diperluas, yaitu tidak sekedar orang yang berilmu agama, tetapi orang berilmu baik agama maupun non agama. Karena tuntutan modernisasi dan globalisasi mengharuskan ulama memiliki kemampuan lebih, kapasitas intelektual yang memadai, wawasan, akses pengetahuan dan informasi yang cukup serta responsif terhadap perkembangan dan perubahan.

Kedua, pesantren harus terus mencari format yang terbaik untuk metode cara pengajarannya. Hal ini bisa dilakukan ketika pesantren berani secara terbuka mempelajari sistem pendidikan modern dengan mengkombinasikannya dengan cara-cara selama ini yang masih sesuai dan relevan.

Ketiga, dunia pesantren harus mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan yang mandiri yang tidak tergantung dengan pihak mana pun. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa pesantren bisa tetap *survive* hingga sekarang ini, di antaranya, karena sifatnya yang mandiri dan tidak tergantung donatur. Namun, ini adalah tantangan terberat bagi pesantren. Karena faktanya, para pengelola pesantren sudah mulai pintar membuat proposal bantuan dana kepada para *funding*, seperti yang juga terjadi lembaga pendidikan selain pesantren. Apabila hal ini terus terjadi, maka pesantren akan kehilangan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan yang independen. Selain itu, pesantren juga akan didikte oleh *funding* yang memberikan suntikan dana.[]

DAFTAR PUSTAKA

- "Merambah Masyarakat Pedesaan". Dalam *Kompas.Com*, Senin, 29 Oktober 2007.
- Asrohah, Hanun. *Pelebagaan Pesantren. Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa*. Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.
- Azizy, Qodri Abdillah. "Memberdayakan Masyarakat Pesantren dan Madrasah". Pengantar dalam Ismail SM. *Signifikansi Pesantren dalam Mengembangkan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Azra, Azyumardi. "Pengantar" dalam buku Nurcholish Madjid. *Bilik-bilik Pesantren: sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Depag RI. *Pola Pembelajaran Pesantren*. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Dhofier, Zamachsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Haedari, Amin. "Perluasan Peran Pesantren". Dalam <http://www.republika.co.id>.
- Hasil rumusan para peserta diskusi tentang *Enterpreneurship* oleh P3M di Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati, 13 Maret 2014.
- Martin Van Bruinessen. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mas'ud, Abdurrahman. "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam Nurul Huda dkk. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nasir, Ridwan. *Mencari Format Tipologi Pendidikan Ideal. Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Qomar, Mujamil. *Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- SM, Ismail. "Signifikansi Pesantren dalam pengembangan Masyarakat Madani". Dalam *Pendidikan Islam. Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1999.
- Zubaedi. "Memotret Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajen dalam Aksi Pengembangan Masyarakat" dalam *Jurnal Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. V, No. Uuni 2004.

INDEKS PENULIS

A

Ali Romdhoni

Pendiri lembaga kajian *Literatur Nusantara* di Jakarta, dan dosen di STAI Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah. Tinggal di Desa Prawoto, Sukolilo, Pati. Email: ali_romdhoni@yahoo.com
"STRATEGI PESANTREN MENGHADAPI PERUBAHAN MASYARAKAT"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 97-108

D

Dimiyati Sajari

Dosen "Ilmu Pemikiran Islam" Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412. Email: dimyatisajari@yahoo.com.
"DZIKIR: MAKANAN SPIRITUAL SANG SUFI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 1-12

F

Fachry Ali

Direktur Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU), Jakarta. Email: fachryali@gmail.com.
"BASIS STRUKTUR SOSIAL PEMIKIRAN ISLAM AWAL, PENGARUH AGAMA DAN RENUNGAN DEWASA INI"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 33-48

G

Gazi Saloom

Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, Jakarta Selatan 15419. Email: thesaloom@gmail.com.
"MENINGGALKAN JALAN TEROR: ANTARA DERADIKALISASI DAN DISENGAGEMENT"
Jurnal Dialog vo..37, No.1, Juni 2014. hal: 109-120

H

Husni Mubarak

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail: husni@paramadina-pusad.or.id
"MENCEGAH ESKALASI KONFLIK KEAGAMAAN: STUDI KASUS NATAL BERSAMA DI UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH "
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 49-60

M

M. Atho Mudzhar

Guru besar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: athomudzhar@yahoo.co.id.
"PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN ENAM NEGARA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 87-96

Muhammad Isnur

Advokat/Pengacara Publik, dan *Researcher* pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
"POTRET KEBERHASILAN PEMOLISIAN DI INDONESIA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 121-126

Muryanti

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga. Jl. Marsda
Adisucipto No. 1 Yogyakarta. Alamat Email: newsyant@yahoo.com
"NASIONALISME DALAM PANDANGAN ETNIK MINORITAS DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS
ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA-TIONGHOA/INTI YOGYAKARTA"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal:75-86

N

Nuruddin

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Kementerian
Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta, Tel. +6221 3920379 Email:
dklaros@yahoo.com
"PERKEMBANGAN MADRASAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM BINGKAI PENELITIAN"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 61-74

R

Rumadi

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang
Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com
"FIKIH HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA: FATWA NU,
MUHAMMADIYAH DAN MUI TENTANG RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM"
Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 13-32

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

